

# Penerapan Sistem Kepegawaian Perangkat Desa Melalui SIPEDE Di Desa Terungwetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Dian Nur Cholidah,  
Ilmi Usrotin Choiriyah  
Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2024

# Pendahuluan

- Sesuai dengan Jogiyanto (2005:11), sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang memenuhi kebutuhan dalam mengelola pertukaran sehari-hari, menjalankan tugas dan aktivitas utama, serta menyediakan laporan penting kepada pihak eksternal. Pembangunan sistem informasi memerlukan integrasi komponen pendukung seperti pemrograman, perangkat keras, pengguna, informasi, dan metodologi.
- Bidang digital digunakan untuk meningkatkan efisiensi, termasuk dalam digitalisasi komunikasi media, penyiaran, dan penyediaan informasi pemerintah. Sistem Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) juga memegang peran penting dalam hal ini. SIPEDE didirikan pada tahun 2020 dan melibatkan pegawai sebagai salah satu sumber daya manusia yang bekerja di Pemerintahan Desa. Tugas utama mereka adalah menciptakan dan melaksanakan strategi sumber daya manusia lokal, yang menekankan pentingnya pengawasan dan pemeliharaan data yang akurat. Sistem Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) juga memiliki peran penting dalam melayani seluruh staf. Pegawai atau perangkat desa merupakan komponen utama dalam tugas-tugas suatu organisasi yang harus diawasi dengan cermat.
- Sistem Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) pada dasarnya berfungsi sebagai pendukung dan menyediakan data yang akurat mengenai pegawai. Pemanfaatan basis informasi ini memungkinkan pemantauan terhadap berbagai kebutuhan pegawai, seperti portabilitas, kemajuan, perpindahan, cuti, tingkat gaji, dan manfaat lainnya. SIPEDE adalah alat yang mencakup pengelolaan perangkat, termasuk data pribadi, keluarga, pendidikan, pelatihan, pekerjaan, pengalaman, tanda jasa atau penghargaan, organisasi, dan pelaporan. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh SIPEDE mencakup data mengenai unit kerja perangkat dan laporan perangkat BPJS. Beberapa perangkat dalam SIPEDE memiliki pusat data dan komunikasi yang khusus yang saling terhubung, memberikan rekomendasi, dan seringkali berinteraksi satu sama lain dalam upaya untuk menyediakan data terkait pekerjaan.

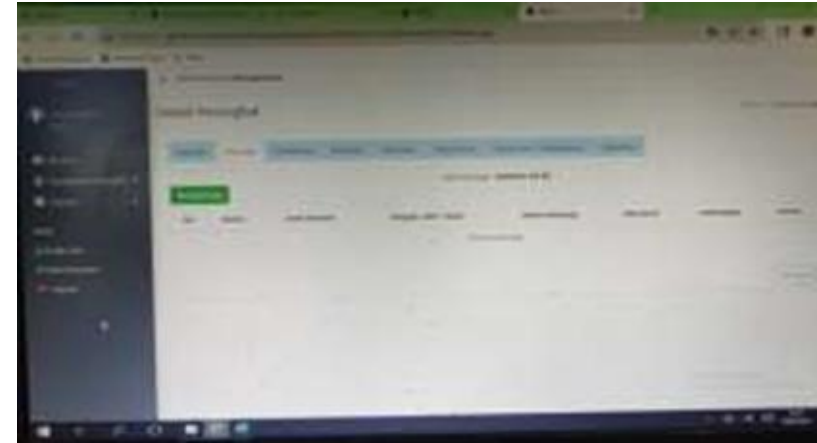
# Pendahuluan

- Pemerintah Desa Terungwetan di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, adalah salah satu Desa yang telah mengadopsi Aplikasi SIPEDE untuk pengelolaan sistem informasi Perangkat Desa. Aplikasi ini dioperasikan oleh satu operator. Dalam pelaksanaannya, jika terjadi pergantian Perangkat Desa yang baru, kejadian kematian salah satu pegawai perangkat, atau pergantian Kepala Desa dari yang lama ke yang baru, semua perubahan data ini harus dimasukkan ke dalam database SIPEDE untuk pembaruan data yang tepat. Proses pembaruan data dalam SIPEDE memiliki dampak yang signifikan terhadap tunjangan, gaji, dan penilaian kinerja pegawai perangkat desa. Data yang akurat dan terkini dalam SIPEDE sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai perangkat desa menerima tunjangan yang seharusnya, gaji yang sesuai, dan evaluasi kinerja yang akurat. Jika nama pegawai perangkat desa tidak tercatat dengan benar dalam aplikasi SIPEDE, maka hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pemberian tunjangan, gaji, dan penilaian kinerja.
- Sistem Informasi Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) adalah terobosan terbaru dalam pengelolaan data perangkat desa yang dikembangkan oleh Dinas PMD. Desa Terungwetan di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo telah mengadopsi SIPEDE sebagai sistem informasi kepegawaian Perangkat Desa. Sebelum SIPEDE, pengelolaan data kepegawaian perangkat desa adalah tugas rumit yang memakan banyak waktu dan tenaga. Sebelum SIPEDE, pemantauan kebutuhan dalam hal data kepegawaian perangkat desa dilakukan secara manual oleh Perangkat Desa. Sebelum adopsi SIPEDE, pengelolaan data kepegawaian perangkat desa menggunakan format Excel dan dicetak dalam berkas fisik. Berkas tersebut dilaporkan langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setiap tiga bulan sekali dengan proses pelaporan manual yang memakan waktu lama. Perubahan dari sistem manual ke SIPEDE telah membawa efisiensi signifikan dalam manajemen data kepegawaian perangkat desa. Dalam sistem manual, pelaporan langsung ke Dinas PMD selama jam kerja dapat menghambat kinerja pegawai.

# Pendahuluan

- Kendala dalam penerapan SIPEDE di Desa Terungwetan, Kecamatan Krian, termasuk fluktuasi data sumber daya manusia yang tinggi dan sifat dinamis dari data tersebut. Data sumber daya manusia (SDM) cenderung mengalami perubahan yang sering, kadang meningkat, dan kadang menurun seiring dengan berjalannya waktu serta kemajuan teknologi dan globalisasi. Kendala ini menciptakan tantangan dalam menjaga data SDM yang akurat dan terkini dalam SIPEDE. Pengelolaan perubahan data yang efisien dan pembaruan data yang cepat diperlukan untuk mengatasi kendala ini dan memastikan pengolahan data sumber daya manusia dengan optimal. Dengan mengatasi fluktuasi dan dinamika data SDM, SIPEDE dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam pengelolaan informasi sumber daya manusia di Desa Terungwetan, Kecamatan Krian. Kendala dalam penerapan SIPEDE di Desa Terungwetan, Kecamatan Krian, juga melibatkan sifat dinamis data SDM yang membuat data pegawai kurang lengkap (up-to-date) sehingga kurang akurat dan valid. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pembaruan data secara teratur atau perubahan data yang tidak segera tercatat dalam SIPEDE.

Data Identitas Pegawai



**Sumber: Website [sipede.sidoarjokab.go.id](http://sipede.sidoarjokab.go.id)**

# Metode

## ❑ Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif

## ❑ Fokus Penelitian

Dengan menggunakan teori Indrajit (2016) yang menggunakan indikator Dukungan, Kapasitas, dan Nilai untuk menganalisis penerapan sistem kepegawaian. Pemilihan indikator ini didasarkan pada masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem kepegawaian di Desa Terungwetan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

## ❑ Sumber Data

- Data Primer
- Data Sekunder

## ❑ Teknik Pengumpulan Data

- Observasi dilakukan di Desa Terungwetan, Krian
- Wawancara dilakukan dengan termasuk Pengurus SIPEDE, Kasi Pelayanan, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa.
- Dokumentasi dan studi pustaka penelitian terdahulu

## ❑ Teknik Analisis Data

- Pengumpulan data,
- Reduksi data
- Penyajian data dan,
- Penarikan kesimpulan

## ❑ Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi di kantor desa Terungwetan kecamatan krian kabupaten sidoarjo

# Hasil dan Pembahasan

## ■ Pendukung (Support)

- *Disepakatinya kerangka E-government Kesepakatan mengenai kerangka e-Government artinya sebelum terbentuk dan berkembangnya e-Government harus disepakati oleh semua pihak yang ada. Pentingnya kebijakan-kebijakan yang disepakati dalam pengembangan e-Government. Kebijakan-kebijakan ini adalah langkah awal yang penting dalam inisiatif pengembangan e-Government, karena mereka menentukan arah dan panduan bagi para penyelenggara negara. Kebijakan-kebijakan tersebut harus dirancang agar mudah dipahami, mudah diimplementasikan, dan sesuai dengan instruksi yang berlaku saat ini. Dengan demikian, mereka membentuk kerangka kerja yang jelas dan efektif untuk mendukung perkembangan e-Government dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.*
- *Dialokasikannya sejumlah sumber daya Sumber daya yang dimaksud dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, waktu, dan informasi. Sumber daya manusia mencakup tenaga pengelola aplikasi, sumber daya keuangan mencakup alokasi dana anggaran, dan sumber waktu serta informasi terkait dengan pengelolaan SIPEDE.*

# Hasil dan Pembahasan

## Data Perangkat Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	Tarlin	Kepala Desa
2.	Saikul As'ad, S.E	Sekretaris Desa
3.	M. Maskurullah, S.Kom	Kaur Keuangan (Operator SIPEDE)
4.	Isnayati	Kasi pemerintah
5.	Muchamad Andri Irawan	Kaur Tata Usaha Dan Umum
6.	Moch Shodiq	Kasi Kesejahteraan
7.	Mawaliyatul Maulidah, S.pd	Kasi Pelayanan
8.	-	Kasi Perencanaan
9.	Saneko	Kasun
10.	Muhammad Munir	Kasun

**Sumber: Diolah Penulis 2023**

- *Disosialisasikannya konsep E-government serara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh.* Penyebaran informasi massa jelas memerlukan kegiatan sosialisasi, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyebarkan informasi yang ingin disampaikan atau informasi yang perlu diketahui masyarakat. Perkembangan e-Government di Kantor Desa Terungwetan tidak lepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran aparat desa agar memahami pentingnya perbaikan data atau proses.

## Sosialisai SIPEDE



**Sumber: Pemerintah Terungwetan 2023**

# Hasil dan Pembahasan

## ■ Kapasitas (capacity)

- Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif E-government. Ketersediaan sumber daya keuangan disini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan membangun dan mengembangkan e-Government, karena faktor keuangan sangat menentukan penggunaan sumber daya lainnya.

Data Anggaran Penunjang SIPEDE

Listrik	RP. 250.000
Wifi	RP. 250.000

Sumber: Pemerintah Terungwetan 2023

- Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Menurut hasil penelitian dan kajian Harvard JFK School of Government, ketersediaan infrastruktur teknologi harus mencapai 50% dari perkembangannya. Karena semakin banyak infrastruktur teknologi maka implementasinya akan

semakin baik. Sebab jika infrastruktur teknologinya sedikit maka implementasinya akan menjadi tidak efektif, karena implementasi e-Government yang bermakna memerlukan infrastruktur teknologi dalam jumlah besar.

Data Infrastruktur Teknologi Informasi

Komputer	2 unit
Wifi	1 unit dengan kapasitas 350mb
Listrik	1 unit dengan kapasitas 900 wat
CPU	2 unit

Sumber: Pemerintahan Desa Terungwetan 2023



# Hasil dan Pembahasan

- pemerintah berfokus pada pemilihan operator yang memiliki kemampuan menggunakan komputer, dan memberikan pelatihan terkait proses pendataan dan pengisian data SIPEDE, yang secara langsung meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia di seluruh kabupaten Sidoarjo. Setelah melalui berbagai pelatihan, operator tidak lagi mengalami kesulitan saat memasukkan data. Kapasitas atau ketersediaan sumber daya untuk pengembangan e-Government di Kabupaten Sidoarjo, terutama sumber daya manusia dan keuangan, dianggap sangat baik. Staf operasional telah dilatih dengan pengetahuan dan keterampilan yang disediakan oleh Pusat Layanan PMD.

Data Pegawai Berkompetain

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	M. Maskurullah, S.Kom	Kaur Keuangan	Operator SIPEDE
2.	Mawaliyatul Maulidah, S.pd	Kasi Pelayanan	Operator SIPRAJA

**Sumber: Pemerintah Desa Terungwetan 2023**

# Hasil dan Pembahasan

## □ Manfaat (Value)

Manfaat program SIPEDE sangat penting bagi kepala desa. Dengan adanya program ini, pengelola desa tidak perlu repot memasukkan data pegawai secara manual, cukup masuk ke SIPEDE dan masukkan data berdasarkan data tersebut menyediakan. Hal menarik atau kelebihan SIPEDE adalah tidak menyia-nyiakkan waktu kerja perangkat desa dengan membuat laporan setiap 3 bulan sekali. Dengan SIPEDE, pembuatan laporan sebulan sekali saja sudah cukup tanpa melalui layanan PMD Sidoarjo.

# Kesimpulan

➤ Berkaitan dengan Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah telah menerapkan Permendes Nomor 18 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam upaya sosialisasi, Dinas PMD telah melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan. Mengenai kapasitas (Capacity), Pemerintah Desa Terungwetan telah menggunakan anggaran dari APBDes untuk implementasi SIPEDE, dan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan yang telah disediakan. Dari segi sumber daya manusia, Perangkat Desa

memiliki jumlah dan kompetensi yang memadai dengan sembilan pegawai. Infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Terungwetan juga memadai dalam hal teknologi. Mengenai elemen nilai (value), perangkat desa merasakan beberapa manfaat dari SIPEDE, seperti peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam layanan publik serta kemampuan untuk melaporkan kinerja mereka. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan SIPEDE, terutama berkaitan dengan kurangnya penginputan data oleh petugas operator.

# Referensi

- [1] A. S. Simanjuntak *et al.*, “KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”.
- [2] Eni, “PENERAPAN LAYANAN INFORMASI BERBASIS WEBSITE DALAM MENINGKATKAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN FAKFAK,” *PENERAPAN LAYANAN Inf. Berbas. WEBSITE DALAM Meningkatkan. E-GOVERNMENT DI KABUPATEN FAKFAK*, 6(11), 951–952., no. Mi, pp. 5–24, 1967.
- [3] Patel and R. Goyena, “PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2019,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 15, no. 2, pp. 9–25, 2019.
- [4] W. Kokotiasa, “Jurnal administrasi Pemerintahan Desa, V2.i1,” vol. 2576, no. 2, pp. 11–23, 2021, [Online]. Available: <http://village.id/index.php/village>
- [5] I. G. Friansyah, D. Agustina, and D. F. Waidah, “Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Di Kantor Bagian Administrasi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Berbasis Website,” *J. Tikar*, vol. 2, no. 1, pp. 83–90, 2021.
- [6] I. mariyanto and S. Supriansyah, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Pemerintah Daerah Di Masa Covid-19,” *JIKO (Jurnal Inform. dan Komputer)*, vol. 4, no. 3, pp. 173–179, 2021, doi: 10.33387/jiko.v4i3.3369.
- [7] Indrajit, “Harvard JFK School of Government,” 2016.

# Referensi

- [8] F. H, "Penerapan Sistem Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Pendidikan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone," J. Ilm. Mandala Educ., vol. 7, no. 3, pp. 606–618, 2021, doi: 10.36312/jime.v7i3.2324.
- [9] A. H. N. Sugeng, S. Muchsin, and H. Hayat, "IMPLEMENTASI PROGRAM SI PERLU (SISTEM INFORMASI PRESENSI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG) DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI (Studi Kebijakan Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang)," J. Respon Publik, vol. 15, no. 7, pp. 69–75, 2021.
- [10] K. Desa, "Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia," Pembang. Kaw. Perdesaan. Diunduh dari [http ...](http), pp. 1–20, 2016.
- [11] A. Sucipto et al., "Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari," J. Soc. Sci. Technol. Community Serv., vol. 3, no. 1, p. 29, 2022, doi: 10.33365/jsstcs.v3i1.1512.
- [12] N. R. Sitompul and A. Widiyarta, "Penerapan Aplikasi Salaman ( Selesai dalam Genggaman ) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung," vol. 5, no. 1, pp. 220–230, 2023.
- [13] Y. D. Lestari, J. T. Nugraha, and N. M. Fauziah, "Pengembangan E-Government melalui Layanan Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang," J. Ilmu Adm. Media Pengemb. Ilmu dan Prakt. Adm., vol. 16, no. 2, pp. 163–178, 2019, doi: 10.31113/jia.v16i2.230.
- [14] M. Aplikasi, E. D. I. Dinas, P. Modal, D. A. N. Pelayanan, T. Satu, and P. Kabupaten, "Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan".
- [15] A. Ramadhania and J. Sutisna, "Penerapan E-Government Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Jakarta Kini ( Jaki ) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022," vol. 5, no. 1, pp. 29–48, 2023.

